



PEMERINTAH KOTA CIREBON  
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Siliwangi Nomor 84, Cirebon 45124 Telepon (0231) 206011 s.d. 20601  
Email setda@cirebonkota.go.id Website setda.cirebonkota.go.id

KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON  
NOMOR 24 TAHUN 2026

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CIREBON TAHUN 2026

- MENIMBANG : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;  
b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;  
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik Pemerintah Kota Cirebon sebagai Badan Publik Wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon;
- MENINGGAT : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);  
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);  
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);  
6. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2013 tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 48);  
7. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi

6. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2013 tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 48);
7. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2024 Nomor 22);
8. Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 437 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN  
KESATU :  
KEDUA :
- : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.
  - : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon  
Pada tanggal 25 Februari 2026









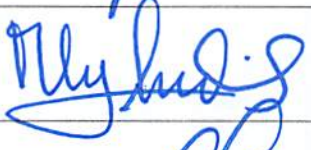


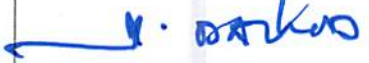




Sekretaris Daerah Kota Cirebon  
selaku Atasan PPID Kota Cirebon

  
SUMANTO

**Lembar Uji Konsekuensi**

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
	<i>Sunarto</i>	<i>Setia</i>	<i>[Signature]</i>
	M. MURLIK	Agustin	<i>[Signature]</i>
	<del>Asep Kurniawan</del>	Susli	<i>[Signature]</i>
	Pers A	Peluru	<i>[Signature]</i>
	Piana Nanda C	Fuspem	<i>[Signature]</i>
	Murpartaro	RSO GJ.	<i>[Signature]</i>
	TANTO KURNIYANA	Kec. Kejilasan	<i>[Signature]</i>
	UDIAN TO	Dicub	<i>[Signature]</i>
	Alisa	BPBD	<i>[Signature]</i>
	Juliantha MR	DP3 APPK B	<i>[Signature]</i>
	Asep Kurnanda	Dkukmff	<i>[Signature]</i>
	TRIMULYAMINESIH	DIMKES	<i>[Signature]</i>

	Herlennis	Dinsos	
	Yusef Riyadu	keppelitbagas	
	Henry Pinarini	DKPPP	
	Dede Selaman	Asbulpas	
	Linda Suminar	setda	
	Dok Ariefin	Dppts	
	Juadi	DLH	
	Bagas	Dispusip	
	Olly Indira F.	BKPSDM	
	M. Alho Kena	Amo PuTK	
	Mulyan	Satpol pp	
		Wanwan - P	
	YUDHI. SETIADI	BPKPP	
	Opung Sumardi	kec. kesambi	
	Imanir - A	Perumda. AM	



**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN  
URUSAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA CIREBON**

No	Unit Kerja	Informasi (Berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
				Dibuka	Ditutup	
1	Seluruh Perangkat Daerah	RKA/DPA Murni	UU No. 14 Tahun 2008 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara	Bila terjadi multi tafsir terhadap pemahaman yang tidak utuh terhadap RKA/DPA akan menghambat pelaksanaan kegiatan	Pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan input, output, outcome yang telah ditetapkan dalam DPA	Sampai dengan LKPD Audited
2	Seluruh Perangkat Daerah	LHP BPK	UU No. 14 Tahun 2008 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara	Bila terjadi multi tafsir terhadap pemahaman yang tidak utuh terhadap LHP BPK akan menjadikan dugaan dugaan yang tidak berdasar	Temuan temuan dalam LHP BPK dapat diselesaika sesuai dengan rekomendasi BPK tanda ada kegaduhan	Sampai dengan LKPD Audited
3	Seluruh Perangkat Daerah	Daftar Gaji Pegawai	UU No. 14 Tahun 2008 UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Mengungkap data pribadi pegawai	Melindungi data pribadi pegawai	Tidak Terbatas
4	Seluruh Perangkat Daerah	Daftar Utang Pegawai	UU No. 14 Tahun 2008 UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Mengungkap data pribadi pegawai	Melindungi data pribadi pegawai	Tidak Terbatas
5	Seluruh Perangkat Daerah	Daftar Rek Bank Pribadi Pegawai	UU No. 14 Tahun 2008 UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Mengungkap data pribadi pegawai	Melindungi data pribadi pegawai	Tidak Terbatas

6	Seluruh Perangkat Daerah	Data Wajib Pajak	Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Pasal 34 PMK No 207 tahun 2018	Mengungkap data pribadi wajib pajak	Melindungi data pribadi wajib pajak	Tidak Terbatas
7	Seluruh Perangkat Daerah	Data Piutang	Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Pasal 34 PMK No 207 tahun 2018	Mengungkap data pribadi wajib pajak	Melindungi data pribadi wajib pajak	Tidak Terbatas
8	Seluruh Perangkat Daerah	SPP Fisik SPM Fisik SP2D Fisik karena mengandung: No Rekening, Bank Pribadi, PPH dan PPN Penyedia (rekanan) NPWP Penyedia (rekanan)	UU No 14 Tahun 2008 UU No 27 Tahun 2022	Mengungkap data pribadi wajib pajak/rekanan	Melindungi data pribadi wajib pajak/rekanan	Tidak Terbatas
9	Seluruh Perangkat Daerah	Data BMD seperti data detail BMD: Dokumen Penggunaan, Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD, Pemanfaatan, Status Aset Pemerintah Tanah – Bangunan (sertifikat), kendaraan (BPKB) Identitas Penyewa Aset Pemerintah PPH dan PPN Penyedia (rekanan) NPWP Penyedia (rekanan)	Pasal 17 huruf e UU No. 14 Tahun 2008 UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan data Pribadi	Mengungkap data pribadi wajib pajak/rekanan  Penyalahgunaan Dokumen oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi data pribadi wajib pajak/rekanan  Mengamankan Aset milik Negara	Tidak Terbatas
10	Seluruh Perangkat Daerah	Dokumen masuk dan Dokumen yang akan Keluar	UU No 14 Tahun 2008 Pasal 17	Menghambat pengambilan keputusan/kebijakan	Mengamankan pengambilan keputusan/kebijakan	Tidak Terbatas

11	Seluruh Perangkat Daerah	Buku Kas Umum (BKU)	UU 14/2008 Pasal 17 huruf g	Informasi agregat penggunaan anggaran	Rincian transaksi harian, nomor rekening	10 Tahun
12	Seluruh Perangkat Daerah	Laporan keuangan yang belum diaudit dan Tahun Berjalan	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Menjaga proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	sampai keluar hasil audit
13	Seluruh Perangkat Daerah	Daftar Gaji Pegawai	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h	Informasi anggaran belanja pegawai	Besaran gaji per individu	10 Tahun
14	Seluruh Perangkat Daerah	Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (UP/GU/TU/LS)	UU 14/2008 Pasal 17 huruf a, b, dan c	Menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Melindungi data yang bersifat rahasia, seperti nomor rekening, tanda tangan pejabat, bukti transaksi rinci, dan data pihak ketiga	5 Tahun
15	Seluruh Perangkat Daerah	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang telah selesai (Final)	Pasal 17 huruf a, h, dan i UU KIP No. 14 Tahun 2008	Menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Berisiko mengungkap data pribadi pegawai (NIK/Gaji), rahasia jabatan, serta identitas saksi yang membantu audit.	Selama data sensitif di dalamnya masih dilindungi UU lain
16	Seluruh Perangkat Daerah	Laporan Hasil Riview yang bersifat Final	Pasal 17 huruf a dan I UU KIP No. 14 Tahun 2008	Menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Menimbulkan kegaduhan publik atas temuan yang sedang dalam masa perbaikan, dan menghambat	Sampai tujuan review tercapai atau dokumen yang direview menjadi publik

					efektivitas fungsi pembinaan internal	
17	Seluruh Perangkat Daerah	Rencana kerja dan anggaran sebelum disahkan	Pasal 17 huruf d UU KIP	Dapat disalahgunakan	Menimbulkan spekulasi publik	Sampai disahkan
18	Seluruh Perangkat Daerah	Dokumen pembahasan internal RKA dan DPA sebelum ditetapkan	Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Membuka strategi kebijakan anggaran belum final	Menaati Undang-Undang	Selama UU mernbatasi Untuk dirahasiakan ke publik
19	Seluruh Perangkat Daerah	Dokumen seperti SPJ, SP2D, SPM, SPP, dll	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan. Pasal 17 huruf l Undang – Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	Menaati undang-undang	Dapat dibuka Untuk keperluan audit.
20	Seluruh Perangkat Daerah	Informasi atas hasil pemeriksaan yang berisikan tentang data keuangan maupun kinerja pelayanan.	Pasal 17 huruf i dan j Undang – Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menimbulkan stigma yang tidak sesuai karena perbedaan persepsi atas suatu pernyataan penilaian antara birokrasi dan masyarakat pada umumnya	Menaati undang-undang	Dapat dibuka jika mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang
21	Seluruh Perangkat Daerah	Rencana kerja dan anggaran sebelum disahkan	Pasal 17 huruf d UU KIP	Menimbulkan spekulasi publik	Menaati undang-undang	Sampai disahkan

22	Seluruh Perangkat Daerah	Laporan-laporan keuangan yang belum final dan diaudit	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>▪ PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan</li> </ul>	Berpeluang terjadi multitafsir dan informasi yang belum tentu benar	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas
23	Seluruh Perangkat Daerah	Laporan Gaji Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17</li> <li>▪ PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan</li> </ul>	Mengungkap data pribadi pegawai	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
24	Seluruh Perangkat Daerah	Laporan Pinjaman Bank Pegawai	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi pegawai	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
25	Seluruh Perangkat Daerah	Arsip dinamis, aktif dan inaktif yang berisikan; <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen keuangan; SPJ berikut lampirannya</li> <li>- Dokumen anggaran dan otoritasnya</li> <li>- Surat pencairan anggaran</li> <li>- Memorandum/surat-surat penting yang perlu dirahasiakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17;</li> <li>• UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 Ayat (1) dan (2)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghambat proses penegakan hukum;</li> <li>• Menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan yang mendahului sebelum diaudit;</li> </ul> Menggangu proses pelaksanaan kegiatan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan data lengkap yang dilindungi dalam proses hukum;</li> <li>• Melancarkan pelaksanaan kegiatan;</li> </ul> Mendorong keberhasilan pembangunan	Sampai dokumen teraudit
26	Seluruh Perangkat Daerah	Seluruh Dokumen Perencanaan dan pengolahan keuangan tahun berjalan	Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat Menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Menaati undang-undang yang berlaku dan melindungi dokumen negara	Selama Undang-undang membatasi untuk dirahasiakan

						atau diungkapkan ke publik
27	Seluruh Perangkat Daerah	Sistem pengelolaan keuangan dan database	Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Menghindari terjadinya kesalahpahaman informasi di mata publik	Tidak terbatas
28	Seluruh Perangkat Daerah	Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup sebelum disahkan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan	Mendukung proses penegakkan hukum	Sampai ada Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja SKPD Tahun 2026
29	Seluruh Perangkat Daerah	Dokumen Pertanggungjawaban keuangan termasuk buku bendaharawan dan buku pembantu lainnya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>2. Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> <li>3. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara</li> <li>4. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara</li> </ol>	Dapat Menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Menaati undang-undang yang berlaku dan melindungi dokumen negara	Tidak terbatas
30	Seluruh Perangkat Daerah	Dokumen penawaran harga penyedia	UU 14/2008 Pasal 17 huruf b	Merugikan pelaku usaha	Publik tak lihat detail	Sampai kontrak selesai

31	Seluruh Perangkat Daerah	Data Wajib Pajak	PERKI No 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik	dapat mengungkap rahasia pribadi	Mengamankan informasi pribadi	Selama Peraturan membatasi untuk dirahasiakan atau diungkapkan ke publik
33	Seluruh Perangkat Daerah	Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	<p>Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Lampiran I Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Negara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara</p> <p>Pasal 23 s.d Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</p>	<p>Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab</p> <p>Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara</p>	Menjaga proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Ketua TIM Program dan Keuangan
34	Seluruh Perangkat Daerah	Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dinas	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j	Mempengaruhi kecepatan, ketepatan dan keakuratan laporan keuangan daerah serta	Mempercepat selesainya laporan keuangan daerah yang akurat dan akuntabel serta	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17

				Menghambat penyelesaian laporan keuangan dan tindak lanjut atas rekomendasi BPK	Mempercepat penyelesaian laporan keuangan dan tindak lanjut atas rekomendasi BPK	huruf i dan huruf j
--	--	--	--	---	--	---------------------

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN  
URUSAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA CIREBON**

No	Unit Kerja	Informasi (Berisi Informasi tertentu)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)	Jangka Waktu (disebutkan)
----	------------	---------------------------------------	------------------------------------	--	---------------------------

		yang akan dikecualikan				jangka waktunya)
				Dibuka	Ditutup	
1	Seluruh Perangkat Daerah	Surat usul/ laporan/ pengaduan dari SKPD/ Instansi tentang dugaan pelanggaran disiplin	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Informasi yang berkaitan dengan hak hak pribadi (Bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah)	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2	Seluruh Perangkat Daerah	Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf h	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dapat menghambat proses penegakan hukum</li> <li>▪ Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memperlancar proses penegakan hukum</li> <li>▪ Menjaga rahasia pribadi seorang PNS</li> </ul>	Sampai ada keputusan tetap
3	Seluruh Perangkat Daerah	Identitas PNS yang dijatuhi hukuman disiplin	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
4	Seluruh Perangkat Daerah	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/perkawinan	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Setelah Terbitnya Surat Izin Perceraian
5	Seluruh Perangkat Daerah	Berita Acara Penasehatan Ijin Perceraian	Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf i dan j.	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
7	Seluruh Perangkat Daerah	Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin	Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf i dan j.	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
8	Seluruh Perangkat Daerah	Laporan Hasil Penasehatan Ijin Perceraian	Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf i dan j.	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

9	Seluruh Perangkat Daerah	Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin	Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf i dan j	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
10	Seluruh Perangkat Daerah	Surat Keputusan Ijin Perceraian	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i</li> <li>▪ Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS</li> <li>▪ Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Melindungi rahasia pribadi seorang PNS</li> <li>▪ Mengamankan proses penyusunan kebijakan</li> </ul>	Tidak terbatas
11	Seluruh Perangkat Daerah	Surat Keputusan Hukuman Disiplin	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf l</li> <li>▪ Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</li> </ul>	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
12	Seluruh Perangkat Daerah	Laporan Hasil Assessment Center	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h</li> <li>▪ Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik Pasal 2 ayat 3</li> </ul>	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengamankan proses penyusunan kebijakan</li> <li>▪ Melindungi rahasia pribadi seorang PNS</li> </ul>	Selama belum Ada perubahan jabatan / Selama masih ada gap kompetensi, dan/atau belum
13	Seluruh Perangkat Daerah	Data Hasil Evaluasi kinerja PNS/Pejabat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	Tidak terbatas

14	Seluruh Perangkat Daerah	Data Hasil Tes Potensi/Kompetensi PNS/Pejabat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	Tidak terbatas
15	Seluruh Perangkat Daerah	Data nilai peserta <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ujian Dinas</li> <li>▪ Ujian KPPI</li> <li>▪ Pencantuman Gelar</li> </ul>	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Akan menimbulkan keresahan dan kolusi	Mencegah KKN	Sampai dengan pengumuman
16	Seluruh Perangkat Daerah	Daftar Nilai DP3/SKP PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Selama masih berlaku
17	Seluruh Perangkat Daerah	Biodata elektronik ASN (database)	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
18	Seluruh Perangkat Daerah	SK Penetapan calon peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, Administrator dan Pengawas	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan Penetapan peserta Diklat Kepemimpinan
19	Seluruh Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Tenaga Pengajar dan Peserta Diklat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	Sampai ada Persetujuan tertulis dari tenaga pengajar yang dievaluasi
20	Seluruh Perangkat Daerah	Data Hasil Check Up perorangan PNS/Pejabat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	Sampai ada persetujuan tertulis
21	Seluruh Perangkat Daerah	Data Rencana penempatan Pegawai	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan penyerahan SK

22	Seluruh Perangkat Daerah	Dokumen hasil sidang Baperjakat(notulen pertimbangan/rekomendasi, daftar nominasi/ranking Pejabat Struktural)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses Penyusunan kebijakan	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait
24	Seluruh Perangkat Daerah	Data rencana penempatan PNS dalam jabatan struktural	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Menjaga iklim kondusif lingkungan kerja	Sampai dengan pelantikan
25	Seluruh Perangkat Daerah	Data PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawai	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan Dapat mengganggu proses Penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan premature	Melindungi hak pribadi Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan Pelantikan
26	Seluruh Perangkat Daerah	Dokumen pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat mengganggu proses Penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya	Mengamankan proses Penyusunan kebijakan	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan

				pengungkapan secara prematur		keputusan yang terkait
27	Seluruh Perangkat Daerah	SK pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK(pelantikan)
28	Seluruh Perangkat Daerah	Data pribadi PNS, meliputi: Daftar riwayat hidup, Data Kesehatan ASN yang mengajukan izin perceraian atau perkawinan, Rekening tabungan dan Pinjaman Pegawai Hak kekayaan pribadi yang menurut aturan tidak wajib dibuka atau yang belum diverifikasi KPK untuk dibuka	Pasal 17 huruf (h) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan

29	Seluruh Perangkat Daerah	Dokumen pengelolaan kepegawaian: 1. Kenaikan pangkat Gaji 2. Kenaikan Berkala 3. Mutasi 4. Pensiun Administrasi kepegawaian 5. NIK 6. NPWP	Pasal 17 huruf (h) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
30	Seluruh Perangkat Daerah	Informasi terkait ASN yang dipanggil kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau instansi penegak hukum lainnya	Pasal 17 huruf(a) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap identitas informan, pelapor, saksi, atau korban yang mengetahui tindak pidana. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	Menjaga keamanan informan, pelapor, saksi, atau korban yang mengetahui tindak pidana. Menjaga kelancaran proses penegakan hukum.	Kasubag Umum dan Kepegawaian
31	Seluruh Perangkat Daerah	Penilaian kinerja pegawai	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h	Konflik internal	Transparansi personal terbatas	5 tahun
32	Seluruh Perangkat Daerah	Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai	Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkap rahasia Pribadi atau Jabatan	Melindungi data pribadi seseorang dan menaati undang-undang yang berlaku	Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau diungkapkan ke publik

33	Seluruh Perangkat Daerah	Data Wajib Pajak	PERKI No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkap rahasia pribadi Dapat mengungkap rahasiian pribadi atau jabatan	Mengamankan informasi pribadi Melindungi data pribadi seseorang dan menaati undang-undang yang berlaku	Selama Peraturan membatasi untuk dirahasiakan atau diungkapkan ke publik
34	Seluruh Perangkat Daerah	Data Updating Kepegawaian pada Aplikasi SIMPEG	Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	Melanggar hak pribadi dan berpotensi disalahgunakan	Menaati Undang-undang	Permanen
35	Seluruh Perangkat Daerah	Analisis Jabatan dan Beban Kerja Tahun 2023	Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	Melanggar hak pribadi dan berpotensi disalahgunakan	Menaati Undang-undang	Dinilai Kembali
36	Seluruh Perangkat Daerah	Semua kode rekening milik pegawai dijaga sebaik mungkin kerahasiaanya	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Mengganggu proses transaksi keuangan/memungkinkan terjadinya kejahatan	Melindungi kerahasiaan data pegawai	Tidak Terbatas
37	Seluruh Perangkat Daerah	Data Kekayaan Pegawai	PERKI No. 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Melanggar Undang-undang	Menaati Undang-undang	Selama Undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau diungkap ke publik
38	Seluruh Perangkat Daerah	Laporan Analisis Jabatan	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Melanggar hak privasi dan berpotensi disalahgunakan	Menaati Undang-undang	Dinilai kembali

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN  
URUSAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA CIREBON**

No	Unit Kerja	Informasi (Berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
				Dibuka	Ditutup	
1	Seluruh Perangkat Daerah	Surat Kadis tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)	Berpotensi disalahgunakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Dinilai kembali
2	Seluruh Perangkat Daerah	Data Sarana Prasarana	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)	Berpotensi disalahgunakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Dinilai kembali
3	Seluruh Perangkat Daerah	Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya	Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas
4	Seluruh Perangkat Daerah	Surat pimpinan DPRD yang bersifat rahasia dan strategis	Pasal 17 huruf c UU No" 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengganggu Hubungan kelembagaan dan keamanan internal	Menaati Undang-Undang	Selama UU membatasi Untuk dirahasiakan ke publik
5	Seluruh Perangkat Daerah	Notula rapat internal strategis	Pasal 17 huruf d UU KIP	Berpotensi disalahgunakan	Mengganggu pengambilan keputusan	Tidak terbatas

6	Seluruh Perangkat Daerah	Dokumen Hasil Evaluasi SAKIP	UU 14/2008 Pasal 17 huruf a dan i	Mendorong transparansi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Melindungi catatan internal evaluator, analisis kelemahan, rekomendasi strategis, dan data pendukung yang bersifat internal	2 Tahun
7	Seluruh Perangkat Daerah	Telaahan staf dan pertimbangan kebijakan	Pasal 17 huruf d UU KIP	Berpotensi disalahgunakan	Menggangu independensi kebijakan	Sampai ditetapkan
8	Seluruh Perangkat Daerah	Soal ujian yang belum digunakan	Pasal 17 huruf b UU KIP	Berpotensi disalahgunakan	Menggangu kejujuran ujian	Sampai digunakan
9	Seluruh Perangkat Daerah	Bank soal ujian	Pasal 17 huruf b UU KIP	Berpotensi disalahgunakan	Menghilangkan fungsi evaluasi	Selama digunakan
10	Seluruh Perangkat Daerah	Memorandum dan DispoSisi Pimpinan	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17	Menghambat proses pengambilan keputusan/kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan	Tidak Terbatas
11	Seluruh Perangkat Daerah	Nota Dinas	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17	Menggangu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas
12	Seluruh Perangkat Daerah	Semua data, surat surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menggangu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas

13	Seluruh Perangkat Daerah	Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17</li> <li>▪ UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ul>	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas
14	Seluruh Perangkat Daerah	Surat Perjanjian Kemitraan	UU 14/2008 Pasal 17 huruf b dan h; Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi	Menjaga persaingan usaha yang sehat dan melindungi kerahasiaan data pribadi	5 tahun (menyesuaikan jadwal retensi arsip) namun dapat dibuka hanya untuk pihak terkait
15	Seluruh Perangkat Daerah	Notulensi Rapat Internal Tertutup Pimpinan	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008	Mengganggu proses perumusan kebijakan	Menjamin kebijakan dirumuskan secara matang	Sampai kebijakan ditetapkan
16	Seluruh Perangkat Daerah	Dokumen hasil sidang Baperjakat	Pasal 17 huruf (h) dan (i) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses penyusunan pengambilan kebijakan karena adanya pengungkapan informasi secara prematur	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Sampai kebijakan ditetapkan

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN  
URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA CIREBON**

No	Unit Kerja	Informasi (Berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
				Dibuka	Ditutup	
1	DISPORA	Informasi tentang Data Pribadi Kepegawaian, Data Atlit, Data Pelatih, Data Pribadi Organisasi Kepemudaan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN  
URUSAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA CIREBON**

No	Unit Kerja	Informasi (Berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
				Dibuka	Ditutup	
1	DISBUDPAR	Dokumen Pribadi Peserta Pelatihan/Pembinaan SDM dan Sanggar Seni	Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan.	Terjaganya data pribadi yang bersifat privasi.	Tidak terbatas
2	DISBUDPAR	Dokumen Pengelola Promosi Wisata	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.	Membangun persaingan usaha yang sehat.	Tidak terbatas
3	DISBUDPAR	Rincian Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata baik dalam dan luar negeri	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan.	Melindungi data dari pihak yang tidak bertanggungjawab	Tidak terbatas

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN  
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA CIREBON**

No	Unit Kerja	Informasi (Berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
				Dibuka	Ditutup	
1	DLH	Identitas pelapor/pengadu dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak berhak	perlindungan pelapor	Selama masih berlaku dan atas persetujuan yang bersangkutan atau pihak yang berwenang
2	DLH	Draf pertimbangan teknis sebelum penetapan persetujuan lingkungan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Mengganggu Proses Pengambilan Keputusan	Masih merupakan bagian dari proses internal perumusan keputusan	Sampai dengan ditetapkannya Persetujuan Lingkungan atau keputusan penolakan secara resmi.
3	DLH	Berita Acara Pengawasan ketaatan persetujuan lingkungan aktif	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Menghambat Penegakan Hukum Lingkungan	Masih menjadi bagian dari proses pengawasan dan penegakan hukum administratif.	Sampai dengan selesainya proses tindak lanjut pengawasan dan/atau ditetapkannya sanksi administratif atau keputusan final.
4	DLH	Data pribadi pemohon Persetujuan Lingkungan, peserta pelatihan dan anggota komunitas lingkungan (NIK, alamat, kontak)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak berhak	Termasuk rahasia pribadi yang dilindungi undang-undang	Selama data tersebut masih merupakan data pribadi dan tidak ada persetujuan tertulis dari subjek data atau dasar hukum lain yang sah untuk membukanya.

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN  
URUSAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA CIREBON**

No	Unit Kerja	Informasi (Berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
				Dibuka	Ditutup	
1	DKP3	Data Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)	Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008	Berpotensi menimbulkan spekulasi dan kepanikan pasar	Menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan daerah	Selama data bersifat strategis
2	DKP3	Jadwal dan Lokasi Pengawasan Keamanan Pangan (sidak)	Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008	Pengawasan menjadi tidak efektif	Menjamin efektivitas pengawasan dan perlindungan konsumen	Sampai kegiatan selesai
3	DKP3	Data Pribadi Penerima Bantuan	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008	Melanggar privasi dan berpotensi disalahgunakan	Melindungi hak dan keamanan data pribadi	Permanen
4	DKP3	Data Pribadi Pelaku Usaha	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008	Melanggar privasi dan berpotensi disalahgunakan	Melindungi hak dan keamanan data pribadi	Permanen
5	DKP3	Informasi Detil Perusahaan (kapasitas produksi, perijinan dll)	Pasal 17 huruf 6 UU No. 14 Tahun 2008	Sebagian (hanya nama dan alamat usaha)	Melindungi hak dan kepentingan usaha	Permanen
6	DKP3	Dokumen Sengketa Lahan Pertanian dalam Proses Hukum	Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008	Merugikan posisi hukum pemerintah daerah	Menjaga kepentingan hukum daerah	Sampai putusan berkekuatan hukum tetap
7	DKP3	Data Lokasi Wabah Penyakit(Hewan, Tanaman dan Ikan)	Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008	Menimbulkan kepanikan dan stigma	Menjaga ketertiban umum dan efektivitas pengendalian	Sampai kondisi terkendali

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN  
URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA CIREBON**

No	Unit Kerja	Informasi (Berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
				Dibuka	Ditutup	
1	DPUTR	Dokumen sengketa pertanahan	UU 14/2008 Pasal 17 huruf a	Menghambat proses hukum	Informasi perkara terbatas	Sampai inkracht
2	DPUTR	Lokasi penyimpanan aset bernilai tinggi	UU 14/2008 Pasal 17 huruf c	Risiko pencurian	Data aset tidak rinci	Selama aset digunakan
3	DPUTR	Identitas pelapor pengaduan	UU 14/2008 Pasal 17 huruf h	Intimidasi pelapor	Sumber laporan anonim	Permanen
4	DPUTR	Draft kebijakan internal	UU 14/2008 Pasal 17 huruf i	Kebingungan publik	Publik menunggu keputusan final	Sampai ditetapkan
5	DPUTR	Detail teknis konstruksi bangunan vital	UU 14/2008 Pasal 17 huruf c	Potensi sabotase	Informasi teknis terbatas	Permanen
6	DPUTR	Desain Teknis Struktur Jembatan	UU 14/2008 Pasal 17 huruf c	Risiko keamanan	Data teknis terbatas	Permanen
7	DPUTR	Dokumen investigasi kerusakan	UU 14/2008 Pasal 17 huruf a	Ganggu penyelidikan	Informasi tertunda	Sampai investigasi selesai
8	DPUTR	Data cadangan air baku rinci	UU 14/2008 Pasal 17 huruf c	Eksplorasi ilegal	Publik hanya tahu data umum	Permanen
9	DPUTR	Rencana jalur proyek strategis	UU 14/2008 Pasal 17 huruf b	Spekulasi tanah	Publik belum tahu rencana	Sampai diumumkan
10	DPUTR	Rencana pengamanan aset	UU 14/2008 Pasal 17 huruf c	Risiko kriminal	Sistem keamanan tertutup	Selama berlaku
11	DPUTR	Peta jaringan limbah rinci	UU 14/2008 Pasal 17 huruf c	Sabotase fasilitas	Publik hanya data umum	Permanen

12	DPUTR	Data kerusakan sebelum rilis resmi	UU 14/2008 Pasal 17 huruf i	Kepanikan publik	Informasi tertunda	Sampai rilis resmi
13	DPUTR	Rekap Data Akses Sanitasi (Pengelolaan Air Limbah Domestik) Distribusi <i>By Name By Address By NIK</i>	UU 14/2008 Pasal 17 huruf b dan h; Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Dapat disalahgunakan; dan Menimbulkan risiko keamanan data pribadi	Melindungi data perorangan atau entitas peserta	Permanen
14	DPUTR	Rekap Data Akses Air Minum Distribusi <i>By Name By Address By NIK</i>	UU 14/2008 Pasal 17 huruf b dan h; Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Dapat disalahgunakan; dan Menimbulkan risiko keamanan data pribadi	Melindungi data perorangan atau entitas peserta	Permanen

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN  
URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CIREBON**

No	Unit Kerja	Informasi (Berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
				Dibuka	Ditutup	
1	DISDUKCAPIL	Data By Name By Address (BNBA) penduduk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang NO 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang no 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</li> <li>2. Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</li> <li>3. Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> </ol>	Kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi	Melindungi data perorangan atau entitas peserta	Selamanya

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN  
URUSAN SOSIAL KOTA CIREBON**

No	Unit Kerja	Informasi (Berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
				Dibuka	Ditutup	
1	DINSOS	Nama dan alamat pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia</li> <li>▪ UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf H</li> <li>▪ UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin</li> <li>▪ Permensos Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan PMKS dan PSKS Pasal 17 Ayat 2</li> </ul>	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi dari stigma buruk dan negatif	Selama Undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau diungkapkan ke publik, kecuali permintaan khusus untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penelitian</li> <li>▪ Penegakan Hukum</li> <li>▪ Kepentingan</li> <li>▪ Perencanaan serta Pelaksanaan Program Pemerintah</li> </ul>
2	DINSOS	Nama dan Alamat Anak Adopsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf H</li> <li>▪ UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia</li> </ul>	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi dari stigma buruk dan negatif	Selama Undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau diungkapkan ke publik, kecuali permintaan khusus untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penelitian</li> <li>▪ Penegakan Hukum</li> <li>▪ Kepentingan</li> <li>▪ Perencanaan serta Pelaksanaan Program Pemerintah</li> </ul>

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN  
URUSAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CIREBON**

No	Unit Kerja	Informasi (Berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
				Dibuka	Ditutup	
1	DPMPTSP	Identitas Pribadi dari Pengguna Layanan PPID	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat merugikan kepentingan pribadi/perusahaan	Melindungi data pribadi/perusahaan yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
2	DPMPTSP	Rahasia Bisnis dan Persaingan Usaha (Data Keuangan Perusahaan, Rahasia Dagang, Rencana Investasi Strategis)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat merugikan kepentingan perusahaan	Melindungi data perusahaan yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
3	DPMPTSP	Data Pribadi Pemilik Perusahaan (Identitas Pribadi, Kondisi Keuangan Pribadi)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat merugikan kepentingan perusahaan dan data pribadi	Melindungi data perusahaan dan pribadi yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
4	DPMPTSP	Identitas Pribadi dari Pengguna Pengaduan Layanan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Data pribadi dapat dibuka/diakses oleh orang lain	Melindungi data pribadi	Tidak Terbatas
5	DPMPTSP	Persetujuan Bangunan Gedung (Cetak Biru ( <i>Blueprint</i> ) Bangunan)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan	Melindungi data dan dokumen	Tidak Terbatas
6	DPMPTSP	Data Perizinan dan Non Perizinan (Identitas Pemilik, dan Masa Berlaku)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan	Melindungi data dan dokumen	Tidak Terbatas
7	DPMPTSP	Proses Pengawasan dan Penegakan Hukum (HASIL Audit/Pemeriksaan Lapangan)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat merugikan kepentingan pribadi/perusahaan	Melindungi data perusahaan yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN  
URUSAN TENAGA KERJA KOTA CIREBON**

No	Unit Kerja	Informasi (Berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
				Dibuka	Ditutup	
1	DISNAKER	Data Identitas Peserta Pelatihan yang mengikuti Pelatihan di UPT Latihan Tenaga Kerja Kota Cirebon	Pasal 17 huruf a poin 2 dan huruf g Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Termasuk data pribadi yang dilindungi dan berpotensi disalahgunakan	Melindungi privasi Identitas Peserta Pelatihan	a. Permanen; atau b. Terbuka apabila ada perintah
2	DISNAKER	Data Identitas NIK Pencari Kerja terdaftar	Pasal 17 huruf h ayat 3 UU No 14 Tahun 2008 KIP	Termasuk data pribadi yang dilindungi dan berpotensi disalahgunakan	Melindungi privasi pencari kerja terdaftar	a. Permanen; atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan /Lembaga pemerintahan secara tertulis.
3	DISNAKER	Data Identitas NIK Peserta Pemagangan	Pasal 17 huruf h ayat 3 UU No 14 Tahun 2008 KIP	Termasuk data pribadi yang dilindungi dan berpotensi disalahgunakan	Melindungi privasi peserta pemagangan	a. Permanen; atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan /Lembaga pemerintahan secara tertulis.
4	DISNAKER	Data perusahaan yang menerapkan produktivitas dan peningkatan produktivitas yang dilakukan	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Informasi dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak terkait dan persaingan usaha tidak sehat.	Menjaga strategi usaha dan privasi perusahaan	a. Permanen; atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan /Lembaga pemerintahan secara tertulis.

5	DISNAKER	Data Identitas NIK CPMI/PMI terdaftar	Pasal 17 huruf h ayat 3 UU No 14 Tahun 2008 KIP	Termasuk data pribadi yang dilindungi dan berpotensi disalahgunakan	Melindungi privasi CPMI/PMI	a. Permanen; atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan /Lembaga pemerintahan secara tertulis.
6	DISNAKER	Data pengaduan PMI bermasalah	Pasal 17 huruf h ayat 3 UU No 14 Tahun 2008 KIP	Termasuk data pribadi yang dilindungi dan berpotensi disalahgunakan	Melindungi privasi CPMI/PMI Bermasalah	a. Permanen; atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan /Lembaga pemerintahan secara tertulis.
7	DISNAKER	Data Tenaga Kerja Asing yang berada di Kota Cirebon (Dokumen Pribadi Keimigrasian)	Pasal 17 huruf h ayat 3 UU No 14 Tahun 2008 KIP	Termasuk data pribadi yang dilindungi dan berpotensi disalahgunakan	Melindungi privasi TKA	a. Permanen; atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan /Lembaga pemerintahan
8	DISNAKER	Perjanjian Kerjasama Pelatihan dan On The Job Training (OJT)	Pasal 17 huruf h ayat 3 UU No 14 Tahun 2008 KIP	Informasi dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang Mtidak terkait	Menjaga kerahasiaan pihak-pihak yang terkait dalam Kerjasama Pelatihan dan Pemagangan	a. 10 tahun; atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan /Lembaga pemerintahan secara tertulis
9	DISNAKER	Data Peraturan Perusahaan	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berisi informasi data privasi perusahaan	Menjaga privasi data perusahaan, Melindungi kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat bagi perusahaan	a. Permanen; atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan /Lembaga Pemerintahan secara tertulis.

10	DISNAKER	Data Perjanjian Kerja Bersama	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berisi informasi data privasi perusahaan	Menjaga privasi data perusahaan, Melindungi kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat bagi perusahaan	a. Permanen; atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan /Lembaga pemerintahan secara tertulis.
11	DISNAKER	Data Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berisi informasi data privasi perusahaan	Menjaga privasi data perusahaan, Melindungi kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat bagi perusahaan	a. Permanen; atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan /Lembaga pemerintahan secara tertulis.
12	DISNAKER	Data Serikat Pekerja/Serikat Buruh	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berisi informasi data privasi perusahaan	Menjaga privasi data perusahaan, Melindungi kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat bagi perusahaan	a. Permanen; atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan /Lembaga pemerintahan secara tertulis.
13	DISNAKER	Data Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berisi informasi data privasi perusahaan	Menjaga privasi data perusahaan, Melindungi kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat bagi perusahaan	a. Permanen; atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan /Lembaga pemerintahan secara tertulis.

14	DISNAKER	Data Perselisihan Hubungan Industrial	Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berisi informasi data privasi perusahaan dan data pribadi pekerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjaga privasi data perusahaan, Melindungi kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat bagi perusahaan</li> <li>2. Menjaga data pribadi pekerja yang sedang berselisih</li> </ol>	a. Permanen; atau Terbuka apabila ada perintah pengadilan /Lembaga pemerintahan secara tertulis.
15	DISNAKER	Data Penyelesaian Kasus dengan PB dan Anjuran	Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berisi informasi data privasi perusahaan dan data pribadi pekerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjaga privasi data perusahaan, Melindungi kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat bagi perusahaan</li> <li>2. Menjaga data pribadi pekerja yang sedang berselisih</li> </ol>	a. Permanen; atau Terbuka apabila ada perintah pengadilan /Lembaga pemerintahan secara tertulis.
16	DISNAKER	Data Penutupan Perusahaan	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berisi informasi data privasi perusahaan	Menjaga privasi data perusahaan, Melindungi kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat bagi perusahaan	a. Permanen; atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan /Lembaga pemerintahan secara tertulis.

17	DISNAKER	Data Pelaporan PHK	Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berisi informasi data privasi perusahaan dan data pribadi pekerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjaga privasi data perusahaan, Melindungi kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat bagi perusahaan</li> <li>2. Menjaga data pribadi pekerja yang sedang berselisih</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Permanen; atau</li> <li>b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan /Lembaga pemerintahan secara tertulis.</li> </ol>
----	----------	--------------------	---	---	---	--

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN  
URUSAN PERHUBUNGAN KOTA CIREBON**

No	Unit Kerja	Informasi (Berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
				Dibuka	Ditutup	
1	DISHUB	Titik Koordinat dan Spesifikasi Teknis Jaringan FO ATCS	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf c	Transparansi anggaran pemeliharaan infrastruktur	Menghindari sabotase sistem kendali lampu lalu lintas	1 Tahun (Jan-Des 2026)
2	DISHUB	Dokumen Teknis Rinci dan Rahasia Dagang Andalalin Pengembang	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf b UU No. 22 Tahun 209	Mengetahui rekomendasi teknis kelancaran lalu linta area proyek	Melindungi strategi bisnis dan desain teknis internal pengembang	1 Tahun (Jan-Des 2026)
3	DISHUB	Data Pribadi Pemilik Izin Trayek (NIK, Alamat, No HP)	UU No. 27 Tahun 2022 (PDP) UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h	Statistik jumlah total armada dan rute yang tersedia	Melindungi privasi pemilik izin dari potensi tindak kriminal	1 Tahun (Jan-Des 2026)
4	DISHUB	Rencana Detail Rute Perjalanan VVIP (Escort dan Route Management)	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf c UU No. 9 Tahun 2010	Informasi pengalihan arus lalu lintas demi kelancaran publik	Menghindari ancaman keamanan terhadap rute pejabat negara	1 Tahun (Jan-Des 2026)
5	DISHUB	Data Profil Internal dan Kontak Person Pihak Pengelola TK/Paud Peserta SALUD	UU No. 27 Tahun 2022 (PDP) UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf g dan h	Publik dapat mengetahui <b>Daftar Nama TK/PAUD</b> yang telah mengikuti edukasi keselamatan	Melindungi data pribadi kepala sekolah/guru (nomor pribadi) dan detail internal sekolah yang bersifat rahasia untuk menghindari <i>spamming</i> atau tindak kriminal	1 Tahun (Jan-Des 2026)
6	DISHUB	Identitas Juru Parkir yang dilaporkan (Pelapor dan Terlapor)	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf i	Jaminnan bahwa pengaduan warga ditindaklanjuti	Menghindari intimidasi atau konflik fisik di lapangan	1 Tahun (Jan-Des 2026)

7	DISHUB	Rincian Setoran PAD/Retribusi per Titik atau per Jukir Spesifik	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf i UU No. 1 Tahun 2022	Publik mengetahui Total Target dan Realisasi PAD tahunan	Melindungi rahasia data wajib retribusi dan persaingan usaha	1 Tahun (Jan-Des 2026)
8	DISHUB	Rincian Teknis Detail Hasil Uji (Item Kerusakan Spesifik Kendaraan)	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h UU No. 22 Tahun 2009	Publik dapat mengakses Status Kelulusan Uji KIR dan masa berlaku	Melindungi data teknis privat pemilik kendaraan agar tidak disalahgunakan pihak ketiga (misal: saat jual beli)	1 Tahun (Jan-Des 2026)
9	DISHUB	Peta Jaringan Kabel Bawah Tanah dan Panel Induk PJU	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf c	Mengetahui sebaran titik lampu PJU untuk keamanan warga	Mencegah pencurian kabel tembaga atau perusakan panel listrik	1 Tahun (Jan-Des 2026)

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN  
URUSAN PENDIDIKAN KOTA CIREBON**

No	Unit Kerja	Informasi (Berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
				Dibuka	Ditutup	
1	DISDIK	Data pribadi peserta didik ((NIK, KK, alamat lengkap, data kesehatan)	Pasal 17 huruf h UU KIP; Pasal 26 PerKI 1/2021; UU 27/2022	Melanggar hak privasi dan berpotensi disalahgunakan	Melindungi privasi	Selama data dilindungi
2	DISDIK	Nilai individual peserta didik	Pasal 17 huruf h UU KIP	Berpotensi merugikan psikologis dan privasi siswa	Melindungi privasi	Selama siswa aktif
3	DISDIK	Data penerima bantuan pendidikan per individu	Pasal 17 huruf h UU KIP	Menimbulkan stigma sosial	Melindungi privasi	Selama data relevan
4	DISDIK	Data pribadi pendidik (NIK, alamat, rekening, BPJS)	Pasal 17 huruf h UU KIP; PerKI 1/2021	Berpotensi disalahgunakan	Melindungi privasi	Selama data dilindungi
5	DISDIK	Laporan pengaduan masyarakat yang belum diverifikasi	Pasal 17 huruf h UU KIP	Berpotensi menimbulkan fitnah	Melindungi privasi	Sampai diverifikasi
6	DISDIK	Identitas pelapor/pengadu	Pasal 17 huruf h UU KIP	Melindungi keselamatan dan privasi pelapor	Melindungi privasi	Selama diperlukan
7	DISDIK	Dokumen audit internal yang belum final	Pasal 17 huruf a dan b UU KIP; Pasal 27 PerKI 1/2021	Mengganggu proses pengawasan	Melindungi privasi	Sampai selesai
8	DISDIK	Dokumen hasil pemeriksaan eksternal sebelum diumumkan	Pasal 17 huruf a UU KIP	Mengganggu proses penegakan hukum	Melindungi privasi	Sampai resmi diumumkan
9	DISDIK	Strategi pengamanan sekolah	Pasal 17 huruf a UU KIP	Membahayakan keamanan sekolah	Melindungi privasi	Selama digunakan

10	DISDIK	SOP tanggap darurat internal rinci	Pasal 17 huruf a UU KIP	Risiko penyalahgunaan	Menaati Aturan	Selama berlaku
11	DISDIK	Draft kebijakan pendidikan yang belum ditetapkan	Pasal 17 huruf d UU KIP	Menimbulkan kebingungan publik	Menaati Aturan	Sampai ditetapkan
12	DISDIK	Dokumen seleksi kepala sekolah (nilai individual	Pasal 17 huruf h UU KIP	Merugikan peserta seleksi	Menaati Aturan	Sampai proses selesai
13	DISDIK	Data investigasi kasus di satuan pendidikan	Pasal 17 huruf a UU KIP	Mengganggu proses hukum	Menaati Aturan	Sampai selesai
14	DISDIK	Informasi yang dikecualikan berdasarkan putusan pengadilan	Pasal 17 UU KIP	Wajib patuh pada putusan hukum	Menaati Aturan	Sesuai putusan
15	DISDIK	Data Pokok Pendidik (Dapodik)	Pasal 17 UU KIP	Menghambat proses kebijakan pendidikan	Menaati Aturan	Selama data relevan
16	DISDIK	Data Sarana Prasarana	Pasal 17 UU KIP	Merugikan kepentingan negara	Menaati Aturan	Selama data relevan

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN  
URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA CIREBON**

No	Unit Kerja	Informasi (Berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
				Dibuka	Ditutup	
1	BAKESBANGPOL	Jumlah Narapidana Terorisme	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf a Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum.</li> <li>• Mengungkapkan data inteljen criminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional.</li> </ul> <p>Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 11 ayat (1) huruf e Badan Publik tidak wajib menyediakan informasi yang bukan merupakan kewenangannya atau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berpotensi membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat</li> <li>• Melanggar hak privasi subjek data (napiter dan keluarganya)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.</li> <li>• Menjaga hak privasi dan HAM</li> <li>• Mencegah penyalahgunaan informasi oleh pihak tidak bertanggung jawab</li> </ul>	Selama berlaku

			<p>dikuasai karena hubungan kerja dengan badan publik lain.</p> <p>UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pasal 26 setiap orang atau badan hukum dilarang membuka dan/atau membocorkan rahasia intelijen.</li></ul> <p>UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</p> <p>Pasal 4 ayat (2) Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: catatan kejahatan</p>			
--	--	--	---	--	--	--

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN  
URUSAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA CIREBON**

No	Unit Kerja	Informasi (Berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
				Dibuka	Ditutup	
1	SATPOL PP	Identitas Lengkap Pelanggar Peraturan Daerah (Perda)	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)	Akan berpotensi penyalahgunaan data dan melanggar hak privasi individu	Dalam rangka penegakan hukum, yang sah dan dalam proses yustisi	3 tahun
2	SATPOL PP	Berita Acara Pemeriksaan Pelanggar/Terdakwa	Pasal 72 Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)	Akan berpotensi penyalahgunaan data dan melanggar hak privasi individu	Dalam rangka penegakan hukum, yang sah dan dalam proses penyidikan	3 tahun
3	SATPOL PP	Identitas Lengkap Pelanggar Peraturan Daerah (Perda)	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)	Akan berpotensi penyalahgunaan data dan melanggar hak privasi individu	Dalam rangka penegakan hukum, yang sah dan dalam proses pembinaan dan pengawasan	3 tahun
4	SATPOL PP	Surat Pernyataan Pelanggar	Pasal 72 Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)	Akan berpotensi penyalahgunaan data dan melanggar hak privasi individu	Dalam rangka penegakan hukum, yang sah dan dalam proses pembinaan dan pengawasan	3 tahun

5	SATPOL PP	Berkas Perkara Penyidikan PPNS yang masih berjalan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)	Berpotensi mengganggu proses penyidikan, mempengaruhi saksi, dan merukan penegakan hukum	Menjamin proses penyidikan berjalan objektif dan sesuai ketentuan hukum.	3 tahun
6	SATPOL PP	Identitas tersangka dan saksi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)	Dapat merugikan reputasi dan melanggar hak asasi sebelum adanya putusan	Melindungi hak individu dan minjungung asas praduga tak bersalah	3 tahun
7	SATPOL PP	Berita Acara Pemeriksaan (BAP)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)	Dapat mempengaruhi substansi perkara dan jalannya persidangan	Menjaga integritas proses hukum dan kepastian hukum	3 tahun

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN  
URUSAN KESEHATAN KOTA CIREBON**

No	Unit Kerja	Informasi (Berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
				Dibuka	Ditutup	
1	DINKES – RSD GUNUNG JATI	Informasi identitas pasien seperti nama, alamat dan nomor telepon serta bersarnya biaya hutang yang ditanggung pasien tersebut	Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi keuangan seseorang.	Menaati aturan	Dapat dibuka Untuk kepentingan audit dan penagihan melalui KPKNL.
2	DINKES – RSD GUNUNG JATI	Informasi atau dokumentasi mengenai alur, mekanisme, alat atau algoritma yang digunakan dalam pembuatan atau penerapan sistem keamanan data rumah sakit termasuk rekam medik elektronik	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan	Melanggar ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan	Menaati aturan	5 tahun
3	DINKES – RSD GUNUNG JATI	Informasi yang berkaitan dengan identitas pasien dan riwayat penyakit yang diderita pasien.	Pasal 17 huruf h angka 2 dan huruf j Undang – Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Elektronik	Melanggar hak pasien karena dapat mengungkap data pasien yang bersifat privasi.	Menaati aturan	25 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan

4	DINKES – RSD GUNUNG JATI	Informasi berupa gambar, foto dan video tentang rekaman tindakan medis, pasien dan petugas.	Pasal 17 huruf h Undang – Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Melanggar hak pasien karena dapat mengungkap data pasien yang bersifat privasi. Dapat mengganggu kinerja petugas kesehatan dalam melaksanakan tindakan medis dan pelayanan kesehatan lainnya.	Menaati aturan	5 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan
5	DINKES – RSD GUNUNG JATI	Informasi laporan dugaan praktek korupsi yang harus dijaga dari publik yaitu informasi identitas pelapor dan terlapor seperti nama, alamat, nama keluarga dan nomor telepon, kronologi, dan atau objek aduan baik laporan yang dilakukan secara langsung, kanal pengaduan maupun melalui surat, serta detail dari laporan yang masih bersifat praduga.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 huruf a angka 2 Undang – Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengurangi partisipasi Masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran di RSD Gunung Jati</li> <li>2. Masyarakat tidak memiliki kepercayaan terhadap di RSD Gunung Jati</li> </ol>	Menaati aturan	5 tahun atau jika sudah dibuka dalam proses pengadilan

6	DINKES – RSD GUNUNG JATI	Data pribadi penderita penyakit menular dan/atau wabah penyakit	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h</li> <li>b. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</li> </ul>	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan dan kepentingan khusus
7	DINKES – RSD GUNUNG JATI	Data rekam medis pasien rumah sakit/Puskesmas termasuk nomor registrasi rekam medis	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h dan huruf i</li> <li>b. UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran pasal 47 ayat (2)</li> <li>c. UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 57 ayat (1) UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf i tentang Hak Pasien</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang</li> </ul> <p>Data dapat dimanipulasi, dipalsukan atau disalahgunakan untuk tujuan kejahatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melindungi rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang yang dilindungi undang- undang</li> </ul> <p>Melindungi/ mengamankan data dari manipulasi, pemalsuan atau penyalahgunaan untuk tujuan kejahatan</p>	Sampai dengan dibuka oleh pihak-pihak yang berhak atas informasi rekam medis berdasarkan Peraturan Perundang ndangan

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN  
URUSAN KECAMATAN KOTA CIREBON**

No	Unit Kerja	Informasi (Berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
				Dibuka	Ditutup	
1	Seluruh Kecamatan	Laporan Pindah Datang Penduduk	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h dan i (perlindungan data pribadi)	Data statistik agregat kependudukan dapat dipublikasikan	Data individu penduduk (NIK, alamat lengkap)	5 Tahun
2	Seluruh Kecamatan	Dokumen Keamanan Kantor	UU 14/2008 Pasal 17 huruf g	Informasi umum prosedur	Denah, titik pengamanan	Selama berlaku

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN  
URUSAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA CIREBON**

No	Unit Kerja	Informasi (Berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
				Dibuka	Ditutup	
1	IRDA	Ringkasan Informasi tentang Program atau Kegiatan Inspektorat	Pasal 9 ayat (2) huruf b UU KIP No. 14 Tahun 2008	Publik mengetahui fokus pengawasan pemerintah (missal: pengawasan dana desa, audit sekolah, atau evaluasi infrastruktur).	Menaati aturan	Selama program berjalan
2	IRDA	Informasi terkait Peraturan, Keputusan, dan atau Kebijakan yang Mengikat atau Berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Inspektorat	Pasal 9 ayat (2) huruf d UU KIP No 14 Tahun 2008	Publik memahami hak dan kewajibannya serta memiliki kepastian hukum atas prosedur yang berlaku di inspektorat. Hal ini meminimalkan terjadinya malapraktik administrasi	Menaati aturan	Selamanya (selama kebijakan tersebut masih berlaku)
3	IRDA	Pelatihan dan Bimbingan Teknis	Pasal 9 UU KIP No. 14 Tahun 2008	Publik mengetahui kompetensi auditor/pegawai inspektorat dalam mengawal uang negara. Hal ini menunjukkan profesionalisme lembaga	Menaati aturan	Selamanya (arsip laporan tahunan)
4	IRDA	Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Inspektorat	Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019	Memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa Inspektorat telah menjalankan tugas pengawasan dengan efisien	Menaati aturan	Selamanya (sebagai arsip publik)
5	IRDA	Laporan pengaduan masyarakat yang belum diverifikasi	Pasal 17 huruf h UU KIP	Akan berpotensi penyalahgunaan data dan melanggar hak privasi individu	Berpotensi menimbulkan fitnah	Sampai diverifikasi

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN  
URUSAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA CIREBON**

No	Unit Kerja	Informasi (Berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
				Dibuka	Ditutup	
1	BPBD	Data pribadi korban bencana	Pasal 17 huruf h, i, dan j UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Melanggar privasi dan perlindungan data pribadi	Melindungi hak privasi dan keamanan data pribadi korban bencana serta menjamin perlindungan terhadap kelompok rentan	Tidak Terbatas
2	BPBD	Biodata pegawai	Pasal 17 huruf h dan I UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	Tidak Terbatas

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN  
URUSAN KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA CIREBON**

No	Unit Kerja	Informasi (Berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
				Dibuka	Ditutup	
1	DKIS	Data Pengguna Sertifikat Elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik (TTE)	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik Pasal 26	Terancamnya data pribadi pengguna	Data pribadi pengguna terjamin keamanan serta keutuhannya	Tidak terbatas
2	DKIS	Data Pengelolaan Surat melalui Aplikasi Sanapati	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik Pasal 32	Ancaman rahasia pekerjaan organisasi pemerintah	Terjaminnya rahasia pekerjaan/kegiatan pemerintahan	Tidak terbatas
3	DKIS	Data pengguna TTE pada Aplikasi Sistem Penghubung Layanan (SPL) aktif dan nonaktif	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik Pasal 26	Terancamnya data pribadi pengguna	Data pribadi pengguna terjamin keamanan serta keutuhannya	tidak terbatas
4	DKIS	Daftar Pengujian Aplikasi (VA)	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik Pasal 32	Tersebaranya celah keamanan sistem informasi yang masuk dalam daftar pengujian keamanan dan kemudian dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Terjaminnya celah keamanan sistem informasi yang masuk dalam daftar pengujian keamanan sampai dengan perbaikan aplikasi dari sisi keamanan	tidak terbatas

5	DKIS	Data monitoring Security Operation Center (SOC)	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik Pasal 32	Tersebar nya data serangan dan aktifitas server yang dimonitoring	Terjamin nya data serangan dan aktifitas server yang dimonitoring	tidak terbatas
6	DKIS	Laporan Pengelolaan Kegiatan Layanan Persandian dan Keamanan Informasi	Laporan Pengelolaan Kegiatan Kelompok Layanan Persandian dan Keamanan Informasi	Ancaman rahasia organisasi pekerjaan pemerintah	Terjamin nya rahasia pekerjaan/kegiatan pemerintahan	Tidak terbatas
7	DKIS	Identitas Pelapor pada SP4N LAPOR	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Pasal 13 butir (c) yang berbunyi "menjamin kerahasiaan identitas pelapor sesuai dengan ketentuan perundang - undangan" serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Bab IV Kode Etik poin (2) larangan butir (b) menyebarluaskan identitas pengadu	Tersebar nya data pribadi Pelapor dan terancam nya keselamatan jiwa Pelapor	Menjaga dan melindungi data Identitas Pelapor	tidak terbatas
8	DKIS	Isi Pengaduan pada SP4N LAPOR	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan	Disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan menghambat proses tindak lanjut	Menjaga kelancaran tindak lanjut pengaduan	sampai dengan penyelesaian tindak lanjut pengaduan

			Pelayanan Publik Nasional Bab IV Kode Etik poin (2) larangan butir (c) menyebarluaskan informasi dan dokumen (d) memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk kepentingan lain selain penyelesaian Pengaduan	penyelesaian pengaduan		
9	DKIS	Identitas Pemohon Informasi Publik	Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Pasal 15 (Perlindungan Pengaduan)	Tersebar nya data pribadi Pemohon Informasi	Menjaga dan melindungi data Identitas Pemohon Informasi Publik	tidak terbatas
10	DKIS	Bandwidth Management; Perangkat Jaringan	Pasal 17 huruf (j) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ketrbukaan Informasi Publik Pasal 30 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 16 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Pasal 2 ayat 1 huruf g dan ayat 8 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan menghambat proses pelaksanaan SPBE	Dapat melindungi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual.	sampai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak
11	DKIS	IP Address Private/Internet Protocol	Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 43	terancam nya keamanan perangkat serta data	Melindungi akses dan keamanan jaringan	tidak terbatas

12	DKIS	Lokasi Server	Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	terancamnya keamanan perangkat serta data	Melindungi perangkat data	tidak terbatas
13	DKIS	Source Code Aplikasi; Data Dokumen Sistem Aplikasi; Database Aplikasi Sistem Aplikasi.	Pasal 17 huruf (c) dan huruf (i) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP  Pasal 16 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  Pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan menghambat proses pelaksanaan SPBE	Melindungi source code aplikasi	sampai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak
14	DKIS	Koordinat jaringan infrastruktur vital	UU 14/2008 Pasal 17 huruf c	Risiko sabotase	Informasi teknis terbatas	Permanen
15	DKIS	Password & sistem keamanan IT	UU 14/2008 Pasal 17 huruf c; UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo 19/2016 Pasal 30	Peretasan sistem	Publik tak tahu sistem internal	Permanen